



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A 2024



☎ 021-6344766

🌐 <https://bpbd.jakarta.go.id/>

📍 J.L. K.H. Zainul Arifin No. 71 Kel. Duri
Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas pelaksanaan tugas dan pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berusaha menyajikan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan tantangan yang ada, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Ikhtisar Eksekutif, yang menyajikan tujuan dan sasaran utama tersebut;
2. Pendahuluan, yang menyajikan gambaran umum organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta mandat yang diemban;
3. Rencana Strategis, yang menyajikan uraian singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja;
4. Akuntabilitas Kinerja, yang menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;
5. Penutup, yang menyajikan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi DKI Jakarta,





Ikhtisar Eksekutif

LKIP BPBD Prov. DKI JAKARTA 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kapasitas serta potensi sumber daya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan penanggulangan bencana di DKI Jakarta, mempunyai Visi "Ketangguhan Kota Jakarta Dalam Menghadapi Bencana".

Tujuan/Sasaran

CAPAIAN PERKIN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,61	0,61
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	100%	100%

TARGET RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Meneguknya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,53	0,58	0,63	0,68
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100	100	100	100

Kegiatan KSD Pendukung

Revisi/Aspek	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah (Edisi 2, 3, 4) Fungsional dan Pelaksanaan Tahun 2024 dan 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Simulasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Risiko Bencana Provinsi (Perjensi Bencana)
Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Monitoring implementasi dan evaluasi Tim Kerja MAB	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kamtibmas dalam Penanggulangan Bencana
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL			
- Barang Jasa	52.913.840.642	48.441.652.765	91,55%
- Modal	46.543.784.974	45.063.800.900	96,82%
BTL			
- Pegawai	28.360.989.199	26.040.939.199	91,82%
Total BL dan BTL	127.818.614.815	119.546.392.864	93,53%

Realisasi Anggaran

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur dan Kedudukan	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	4
1.4 Personil/Sumber Daya Perangkat Daerah	6
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.5.1 Tugas Pokok	7
1.5.2 Fungsi	7
1.6 Tindak Lanjut LHE Inspektorat	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	9
2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	23
2.3 Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	24
2.4 . Pagu Anggaran pada Target yang mendukung Kinerja	24
2.5 . Kebijakan	29
BAB III	30
AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian IKU Keseluruhan	30
3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024	53
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi	63
3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	63
3.5 Realisasi Anggaran	64
Bab IV	72
PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi.

Dalam upaya meningkatkan keharmonisan masyarakat Jakarta tersebut, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggungjawab untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam penetapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui suatu mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis yaitu pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilihat keadaan topografinya wilayah Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Di daerah bagian utara dan pusat memiliki topografi yang relatif datar memiliki kemiringan di antara 0° dan 2°, sedangkan di daerah bagian selatan memiliki kemiringan topografi di atas 5°. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 0 m sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. Sedangkan dari banjir kanal sampai batas paling Selatan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta antara 5 m sampai 50 m di atas permukaan laut.

Daerah pantai merupakan daerah rawa atau daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di daerah bagian Selatan banjir kanal terdapat perbukitan rendah dengan ketinggian antara 50 m sampai 75 m. Sungai-sungai yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain : Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Sunter.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat 25 Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta yang menjadi Kelurahan Rawan Bencana yang menimbulkan kerugian dan adanya pengungsian. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap

1.2 Struktur dan Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

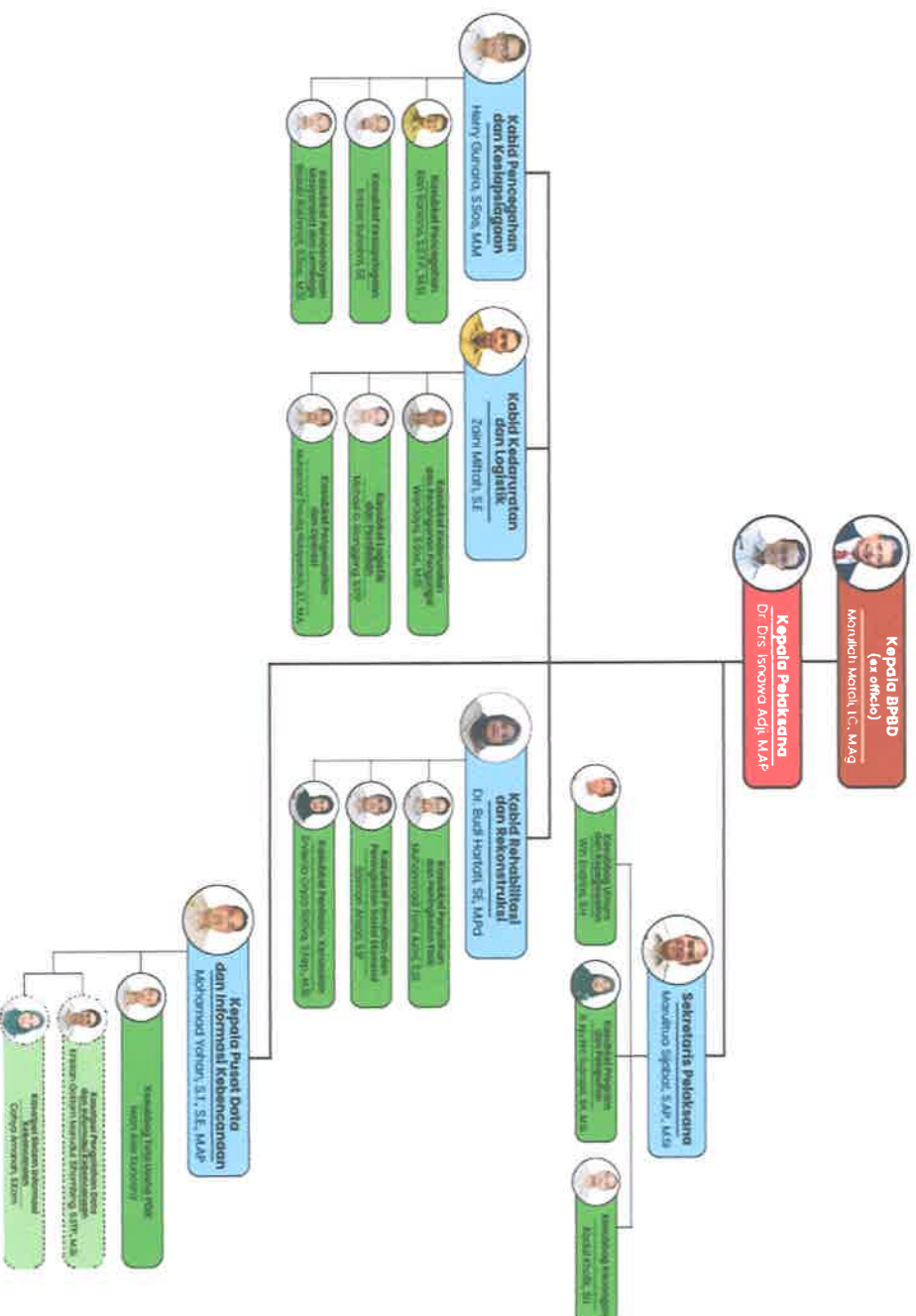
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur Perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan untuk pelaksanaan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dapat digambarkan dalam lampiran I.

Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan



STRUKTUR ORGANISASI BPBD DKI JAKARTA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

1. *Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana.*

Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan ring fire, perlintasanbeberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikanJakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana.Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggiran sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana;

2. *Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah;*

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya di dalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk mengatur hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.

3. *Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan.*

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta *ex officio* Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian tugas SKPD/UKPD terkait penanggulangan bencana sudah mengatur semua tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap daruratdan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. *Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral.*

BPBD Provinsi DKI Jakarta kini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung;

5. *Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat*

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan.

6. *Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami risiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat.*

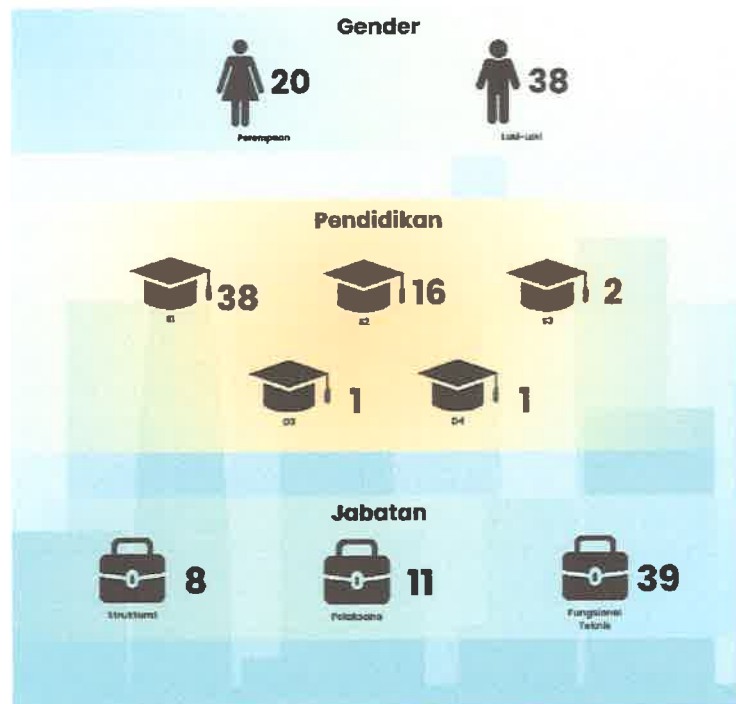
Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat lebih dari 1.060 gedung bertingkat di DKI Jakarta namun belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan Dan Sistem Penanggulangan Bencana Pada Gedung belum diterapkan secara maksimal pada Gedung Bertingkat. Ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi pada Gedung tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam

7. *Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana*

Terdapat 25 Kelurahan titik rawan banjir dan 55 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.

1.4 Personil/Sumber Daya Perangkat Daerah

BPBD Provinsi DKI Jakarta kini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, disusunlah susunan organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :



Gambar 1.2 Data Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

1.5.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.5.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;

1.6 Tindak Lanjut LHE Inspektorat

Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian SAKIP tahun 2023 pada BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah 86,05 dengan predikat A kategori Baik. Terdapat 4 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Tindak lanjut dari Hasil Evaluasi sudah dibuatkan Berita Acara pembahasan cacatan hasil evaluasi dengan hasil kesepakatan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2024, Dokumen rekap prestasi yang dicapai pada BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan bukti dokumentasi dan bukti upload LKIP pada system ESR berupa tangkapan layar.

Kedua hal tersebut sudah dipenuhi oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta dan sudah dikirimkan buktinya pada Inspektorat pada tanggal 10 Oktober 2024.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat hal sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan posisi dan peran BPBD Provinsi DKI Jakarta serta gambaran umum penyusunan LKIP yang terdiri dari dasar hukum penyusunan LKIP, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar perencanaan dan perjanjian kinerja serta gambaran umum kinerja yang meliputi kebencanaan.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

Bab 4 : Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan juga saran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Renstra ini berorientasi pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, mitigasi bencana berbasis masyarakat, respons cepat, serta pemulihan pascabencana yang inklusif. Berlandaskan visi Jakarta tangguh terhadap bencana, Renstra ini menargetkan pengurangan risiko bencana yang terukur melalui sinergi multipihak, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan masyarakat. Dengan pendekatan adaptif dan berbasis data, Renstra 2023-2026 menjadi acuan strategis untuk mewujudkan pelayanan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan perkotaan Jakarta.

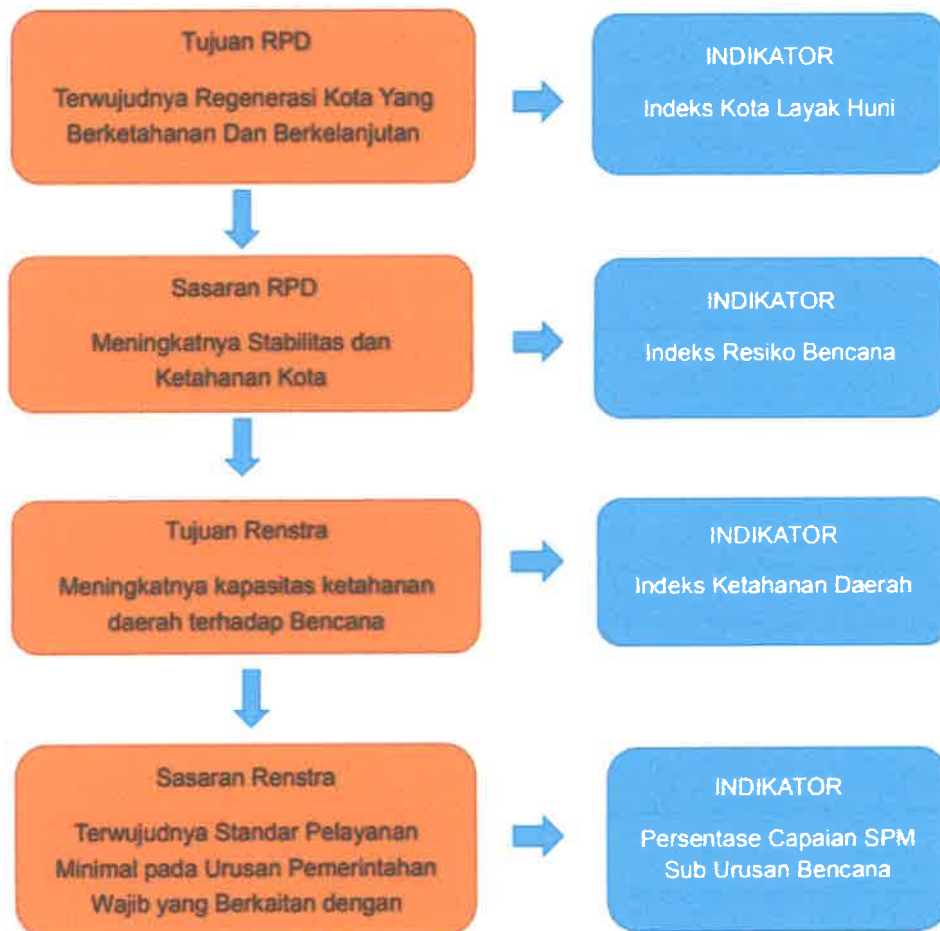
BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD 2023-2026. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, pemenuhan kebutuhan pengungsi serta pendampingan pemulihan pasca bencana. Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan penurunan indeks resiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah melalui :

1. Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
3. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana.

Tujuan dari Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dengan Tolok Ukur Kinerja adalah Indeks Ketahanan Daerah.

Adapun Sasaran Renstra adalah Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah dengan Tolok Ukur Kinerjanya adalah Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana

Gambar 2.1
Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPD



Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 seperti yang tergambar pada Gambar 4.1. Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD/OPD dengan RPD penting, karena pencapaian RPD ditunjang oleh Capaian kinerja Tujuan Jangka Menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam tahun 2023 s.d 2026 yang akan datang. Oleh karena itu, setiap Unit Kerja dari Organisasi BPBD dalam melaksanakan kegiatan dan program mengacu kepada Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi DKI tersebut. Sedangkan sasaran yang harus dicapai dalam rangka “Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana” yaitu: Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan. Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan target capaian. Pencapaian target indikator kinerja sasaran akan menjadi capaian kinerja BPBD setiap tahunnya.

RENSTRA BPBD 2023-2026

KOD E	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.4	MENINGKATKAN STABILITAS DAN KETAHANAN KOTA														
1	PENINGKATAN KAPASITAS KETAHANAN DAERAH TERHADAP BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	Indeks	0,48	0,53	89.979,7 30,0 79	0,58	89.828,6 19,2 56	0,63	90.597,4 57,9 42	0,68	93.652,8 55,0 84	0,68	364,058. 662. 361	
1.1	PEMENUHAN PELAYANAN SPM SUB URUSAN BENCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS KETAHANAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA	Persen	100	100	89.979,7 30,0 79	100	89.828,6 19,2 56	100	90.597,4 57,9 42	100	93.652,8 55,0 84	100	364,058. 662. 361	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	41.859,2 55,5 73	4	40.909,2 00,4 90	4	40.909,2 00,4 90	4	42.059,2 55,5 73	4	165,736. 912. 126	SEKRETAR IAT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	persen	0	100	29.860.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	119.440.000	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	29.860.000	2	29.860.000	2	29.860.000	2	29.860.000	2	29.860.000	8	119.440.000	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	128.094.807.408	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	62	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	128.068.615.408	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	6.548.000	2	6.548.000	2	6.548.000	2	6.548.000	2	6.548.000	8	26.192.000	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	4	4	139.271.220	4	139.271.220	4	139.271.220	4	139.271.220	4	139.271.220	4	557.084.880	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	3	139.271.220	3	139.271.220	3	139.271.220	3	139.271.220	3	139.271.220	12	557.084.880	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	10.045.382.716	SEKRETAR IAT

1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.698.600	1	35.698.600	1	35.698.600	1	35.698.600	4	142.794.400	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	4	5.101.496.348	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	201.212.152	2	201.212.152	2	201.212.152	2	201.212.152	8	804.848.608	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	279.862.392	2	279.862.392	2	279.862.392	2	279.862.392	8	1.119.449.568	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	74.923.200	2	74.923.200	2	74.923.200	2	74.923.200	8	299.692.800	PUSAT DATA DAN INFORMAS I
															KEBENCAN AAN
															SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	178.744.000	2	178.744.000	2	178.744.000	2	178.744.000	8	714.976.000	SEKRETAR IAT
				1	1		1		1		1		4		KEBENCAN AAN
															SEKRETAR IAT

1.05.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	152.648.448	152.648.448	152.648.448	152.648.448	12	275.100.000	48	610.593.792	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	12	275.100.000	275.100.000	275.100.000	275.100.000	12	275.100.000	0	1.100.400	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN SEKRETAR IAT
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	37.782.800	37.782.800	37.782.800	37.782.800	1	37.782.800	4	151.131.200	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	3.513.281.586	2.563.226.503	2.563.226.503	3.513.281.586	4	12.153.016.178	4		SEKRETAR IAT
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	64	0	950.055.083	0	0	950.055.083	68	1.900.110.166	68		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	201.212.152	201.212.152	201.212.152	201.212.152	1	201.212.152	4	804.848.608	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	545.589.814	545.589.814	545.589.814	545.589.814	1	545.589.814	4	2.182.359.256	SEKRETAR IAT

1.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	100.354.445	1	100.354.445	1	100.354.445	1	100.354.445	4	401.417.780	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	4	6.864.280.368	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indeks	4	4	785.803.211	4	785.803.211	4	785.803.211	4	785.803.211	4	3.143.212.844	SEKRETAR IAT
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	704.045.051	1	704.045.051	1	704.045.051	1	704.045.051	4	2.816.180.204	PUSAT DATA DAN INFORMAS I KEBENCAN AAN
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	81.758.160	1	81.758.160	1	81.758.160	1	81.758.160	4	327.032.640	SEKRETAR IAT

1.05.03	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	Percentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelengaraan Penanggulan n Bencana	Persen	0,7	0,84	48.120.474.506	0,92	48.919.418.766	1	49.688.257.452	1,08	51.593.599.511	1,08	198.321.750.235	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Percentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		Percentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100			
		Percentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	persen	100	100	1.006.915.434	100	1.006.915.434	100	1.006.915.434	100	1.536.725.186	100	4.557.471.488		PUSAT DATA DAN INFORMAS
																KEBENCANAAN
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	529.809.752	1	529.809.752	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	Orang	329	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	4.027.661.736	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
															PUSAT DATA DAN INFORMAS	

		Lintas Kabupaten/Kota															KEBENCANAN AAN
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan n Bencana	Orang	1600	1600	24.202.764.171	1600	24.202.764.171	1600	24.202.764.171	1600	24.732.573.923	6400	97.340.866.436	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan n Bencana yang Diegalkan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	1	529.809.752	1	529.809.752	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	1068	2.427.600.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	83.323.076.284	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		

1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600	1068	1.634.186.400	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	4	119.440.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000	20	1.238.400.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	6.130.800.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	1	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	4	57.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	3	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500	12	1.761.114.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

	Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	KESIAPSI AAN	(16)
(1) 1.05.03.1. 02.11	(2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	(3) Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	4	119.440.000	BIDANG KEDARUR ATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	0	100	7.605.924.201	100	8.304.868.461	100	9.073.707.147	100	9.919.429.702	100	34.903.929.511	BIDANG KEDARUR ATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1. 03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	0	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000	48	831.740.000	BIDANG KEDARUR ATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1. 03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	4	1.634.186.400	BIDANG KEDARUR ATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1. 03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	6.989.442.601	94978	7.688.386.861	94978	8.457.225.547	94978	9.302.948.102	37991	32.438.003.111	BIDANG KEDARUR ATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1. 04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah dokumen penataan sistem dasar	Persen	100	100	15.304.870.700	100	15.404.870.700	100	15.404.870.700	100	15.404.870.700	100	61.519.482.800	PUSAT DATA DAN INFORMAS I KEBENCAN AAN	

1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	0	1	19.500.00	1	19.500.00	1	19.500.00	1	19.500.00	1	19.500.00	4	78.000.00	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	240	314.070.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSAAGAAN
1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	0	1	5.045.000,00	1	5.145.000,00	1	5.145.000,00	1	5.145.000,00	1	5.145.000,00	4	20.480.000,00	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Tabel 2.1 – Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Sasaran Strategis				
1	Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	Indeks
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	Persen
Sasaran Khusus				
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	Nilai
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	Persen
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Persen
7	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	Persen
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	Persen
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persen

	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi		
Sasaran Operasional				
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persen

Tabel 2.2 – Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024

2.3 Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 Program Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.4. Pagu Anggaran pada Target yang mendukung Kinerja

Program Kegiatan yang mendukung indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jakarta adalah Program Penanggulangan Bencana, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

Program Kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Keuangan (Rp)
BPBD	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT DAN APARATUR YANG DILATIH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	100.248.433.
BPBD			PERSENTASE PENGUNGGI TERLAYANI KEBUTUHAN DASARNYA DALAM WAKTU 1 KALI 24 JAM	
BPBD			PERSENTASE PENDAMPINGAN YANG DILAKSANAKAN PADA PASCA BENCANA	
BPBD			PERSENTASE KELURAHAN YANG DIBERIKAN INFORMASI RAWAN BENCANA.	
PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PERSENTASE KELURAHAN YANG DIBERIKAN INFORMASI RAWAN BENCANA.	3.160.708.
BPBD	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	3.160.708
PDIK			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	

BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	JUMLAH APARATUR, RELAWAN SERTA POTENSI MASYARAKAT LAINNYA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	81.554.386.
			JUMLAH APARATUR, RELAWAN SERTA POTENSI MASYARAKAT LAINNYA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	
PDIK				
BPBD	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.620.129.
BPBD	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	40.936.563.
BPBD	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	108.015
BPBD	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1.388.535

PDIK			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	
BPBD	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	17.700.
BPBD	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	386.234.
BPBD	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	34.097.207
BPBD	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	8.436.093
BPBD	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	738.977
BPBD	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	119.742
BPBD	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7.577.373

BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	7.097.244.
			PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	
PDIK				
PDIK	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	4.663.295.

Tabel 2.3 Program Kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024

2.5. Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta juga memformulasikan beberapa strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan antara lain :

1. Pendidikan dan latihan khusus penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Administrasi berbasis sistem informasi;
3. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana;
4. Terciptanya sumber daya siaga bencana;
5. Sosialisasi sistem kewaspadaan dini;
6. Pelibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
7. Membangun koordinasi yang efektif;
8. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan tanggap darurat;
9. Pelibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi;
10. Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana;
11. Pengelolaan Pusat Pengendalian Bencana Daerah/Pusat Komando Bencana Daerah;
12. Membangun sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penanggulangan bencana.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun dari kontribusi masing-masing bidang, sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja program. Metode perbandingan pencapaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang akan menghasilkan suatu pencapaian target kinerja program dan indikator yang digunakan adalah *input*, *output* dan *outcome* yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasinya. Untuk indikator kinerja *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum disajikan karena sulitnya dalam proses pengumpulan data mengingat pencapaian indikator kinerja berupa *benefit* dan *impact* sangat terkait dengan tujuan akhir kegiatan.

3.1 Capaian IKU Keseluruhan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta serta RPD tahun 2023-2026 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,61	0,61
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	100%	100%

Tabel 3.1 – Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi DKI Jakarta

3.2 Analisa Capaian Masing Masing IKU

a. Realisasi dari Target Capaian IKU

i. Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, bertahan, dan pulih dari ancaman bencana. IKD mencerminkan tingkat ketahanan daerah terhadap bencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan pembangunan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah.

IKD digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk BPBD DKI Jakarta, sebagai acuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan prioritas penguatan kapasitas. Pengukuran IKD juga membantu dalam menyusun program kerja strategis untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana, mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tangguh.

Terdapat 7 Prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu :

- a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Untuk memperoleh nilai IKD sebesar 0,58, BPBD melakukan kegiatan perkuatan kebijakan dan kelembagaan melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), membuat Kajian Risiko Bencana, penyampaian Informasi Bencana kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, informasi dan edukasi, Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung, penanganan keadaan darurat serta pemberian logistik pada korban bencana

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional.

ii. Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah

Pemenuhan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah adalah upaya strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar yang optimal dalam penanggulangan bencana. Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis pada prinsip kecepatan, ketepatan, dan inklusivitas.

Dalam konteks peningkatan kapasitas ketahanan daerah, pemenuhan SPM bertujuan untuk:

1. Mengurangi Risiko Bencana: Melalui penyediaan layanan mitigasi seperti penyusunan peta rawan bencana, penguatan infrastruktur tahan bencana, dan edukasi masyarakat.
2. Meningkatkan Kesiapsiagaan: Dengan melaksanakan simulasi bencana, pelatihan respons cepat, serta pembangunan sistem peringatan dini yang andal.
3. Memastikan Respons Cepat dan Efektif: Dengan menyediakan layanan tanggap darurat, seperti evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, dan pelayanan kesehatan pascabencana.
4. Mendukung Pemulihan Pascabencana: Melalui rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.

Pemenuhan SPM ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD, yang berorientasi pada peningkatan ketahanan daerah. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi multipihak antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap bencana.

b. Analisa Capaian Berkualitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Organisasi, sasaran strategis yang telah ditetapkan telah berhasil diwujudkan. Suatu Sasaran dapat dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilannya dapat diwujudkan sebesar 80% atau lebih.

Gambaran capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Sasaran Strategis				
1	Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,61
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100
Sasaran Khusus				
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	3,25
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	81,41

7	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	92
Sasaran Operasional				
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100
13	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100

Tabel 3.2. Perjanjian Kinerja BPBD 2024

Dari tabel capaian di atas dapat dilihat bahwa semua target kinerja yang menjadi target di tahun 2024 dapat terpenuhi dengan baik, bahkan pada capaian sasaran khusus untuk Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, melebihi dari targetnya. Demikian juga untuk Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, berdasarkan penilaian dari BKD Setda Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 mendapat nilai 92 % dari target yang ditetapkan sebesar 71%.

c. Perbandingan dengan Target Renstra dengan Perjanjian Kinerja

Renstra 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,53	0,58	0,63	0,68
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100	100	100	100

Tabel 3.3 Rencana Strategis 2023-2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Rentra	Capaian Renstra	Target Perkin	Capaian Perkin
1	Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,58	0,58	0,61	0,61
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, untuk Indikator Kinerja Utama target Indeks Ketahanan Daerah lebih tinggi Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2023 target Renstra sudah mencapai 0,58, sehingga untuk target Perjanjian Kinerja tahun 2024 dinaikkan menjadi 0,61. Sedangkan untuk capaian Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana adalah sama antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja yaitu 100%.

d. Analisis Program dan Kegiatan dengan KSD Pendukung

Renaksi Aksi	Kriteria	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

Renaksi Aksi	Kriteria	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya dokumen standar dan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Bencana ramah penyandang disabilitas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Terselenggaranya sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi penyandang disabilitas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Terselenggaranya sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi penyandang disabilitas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Terselenggaranya sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi penyandang disabilitas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Terselenggaranya sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi penyandang disabilitas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini inklusif penyandang disabilitas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Monitoring implementasi dan evaluasi Tim Kerja MABI	Terlaksananya Koordinasi Internal Kelompok Kerja MABI (POKJA II - Adaptasi Perubahan Iklim)	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas Masyarakat atas potensi bencana akibat perubahan iklim	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Tabel 3.5 Program KSD yang Mendukung

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rencana Aksi di Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 diperuntukkan untuk menunjang Program/Kegiatan / Sub Kegiatan di dalam

Renstra 2023-2026 sehingga keduanya dapat berjalan harmonis dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dengan Tolok Ukur Kinerja adalah Indeks Ketahanan Daerah.

e. Pemanfaatan Sumber daya Anggaran

Pagu anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah Rp. 137.922.531.823,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari 2 program, 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Untuk kegiatan yang mendukung SPM sub urusan bencana, BPBD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 103.306.497.669,- (Seratus tiga milyar tigaratus enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (dengan kegiatan pelatihan, penyusunan renkon, gladi kesiapsiagaan bencana dan penyediaan peralatan penanggulangan bencana)
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (penyediaan logistik, respon cepat penanganan bencana serta pencarian dan pencarian korban bencana)
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (penanganan pasca bencana dan kerjasama antar lembaga)

Proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak nyata bagi penurunan risiko bencana.

f. Faktor Keberhasil dan dan Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di BPBD Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut :

i. Faktor Keberhasilan:

1. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan mitra kerja.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelatihan dan simulasi kebencanaan.
3. Pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung monitoring dan respons bencana.

ii. Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan koordinasi antarinstansi dalam situasi darurat tertentu.
2. Tantangan geografis pada beberapa lokasi terdampak bencana.
3. Keterbatasan jumlah tenaga ahli kebencanaan yang tersedia

g. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan :

1. Rekrutmen tenaga ahli di bidang kebencanaan

BPBD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN dengan Jumlah Petugas Penanganan Bencana Tahun 2024 sebanyak 267 orang, Petugas Call Center sebanyak 33 orang, SO sebanyak 10 orang, Customer Relation 2 orang, Community Manager 10 orang, GIS 2 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang, dan 1 orang SPV untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kebencanaan.

Petugas Penanganan Bencana tersebut bertugas di masing-masing kelurahan dengan posko di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Adapun tugas dari Petugas Penanganan Bencana ini adalah :

- i. Melaksanakan penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana di Daerah;
- ii. Melaksanakan pengurangan risiko bencana di Wilayah;
- iii. Melaksanakan penanganan bencana di Wilayah;
- iv. Melaksanakan pemulihan dini bencana di Wilayah.

Selain itu, BPBD melaksanakan rekrutmen tenaga ahli untuk ditempatkan di Pusdatin sebanyak 7 orang dan di Ruang Literasi Kebencanaan sebanyak 18 orang.

2. Pelatihan berkelanjutan bagi personel BPBD untuk meningkatkan keterampilan teknis

ASN di BPBD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 59 orang yang terbagi dalam 3 bidang, 1 unit, dan 1 sekretariat untuk meningkatkan kapasitas para ASN tersebut sesuai dengan tupoksinya, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh K/L lain, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.3
Data Pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Tahun 2024

	Nama Pegawai	Nama Diklat	Penyelenggara	Keterangan
1	Abdul Kholik	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
2	Abrahamson	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Bimtek Pengelolaan Aset	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
3	Achmad Fauzan	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Junior Graphic Designer Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus
		AI Policy & Skilling Lab” Seri 3: AI dan Kesiapsiagaan Bencana	Universitas Gadjah Mada	Lulus
		National Cyber Exercise #Indonesia Cross-Sectoral Cyber Exercise Malware Stealer Scenario	Badan Siber Sandi Negara Republik Indonesia	Lulus
4	Ahmad Jaelani	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Peningkatan Kinerja Layanan Administrasi Kepala Daerah melalui Digitalisasi Naskah	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Lulus

		Dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		
5	Andi Anjarwati	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
6	Andi Indah Kusuma Taufik Patarai	Bendahara Penerimaan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Bahasa Inggris Untuk Presentasi	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
7	Anggi	Bahasa Inggris Untuk Presentasi	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Bagi Humas Pemerintah Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus
		Pelatihan Digital Public Relations	BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Lulus
8	Aries Trisna Putra	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
9	Aulia Nurul Azizah Asri	Bimtek Pengelolaan Aset	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Junior Graphic Designer (JGD) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus
10	Basuki Rakhmat	Komunikasi Publik - Strategi Komunikasi	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
11	Cahya Amanah	Diklat Bahasa Korea	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan (Training of Trainers) SDM Call Center Layanan Panggilan Darurat 112	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus

12	Dadang Nuriawan	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Kaji Cepat Bencana di Pusat Angkatan II Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
		Training Of Trainers (TOT) Dasar Manajemen Bencana Angkatan V Di Pusat Secara Online Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
13	Dito Wicaksono	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
14	Dwi Basuki	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
15	Ervienia Oryza Sativa	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
16	Firman Anggoro	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Training Of Trainers (TOT) Dasar Manajemen Bencana Angkatan VI Di Pusat Secara Online Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus

17	Ichwan	Komunikasi Publik - Strategi Komunikasi	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Stres	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
18	Isnawa Adji	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
19	Iwan Alex Kuncara	Pelatihan Teknis Penyusunan Perencanaan Kontingensi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
20	Jeffry Listiyadi	Webinar Tapak Tilas Perkeretaapian	Universitas Gadjah Mada	Lulus
		Program Kesejahteraan KORPRI Mart	Dewan Pengurus KORPRI Nasional	Lulus
		Webinar Pensiun yang Membahagiakan	Dewan Pengurus KORPRI Nasional	Lulus
		Junior Graphic Designer (JGD) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus
		Webinar KORPRI Sukseskan Pemilu & Pilkada 2024	Dewan Pengurus KORPRI Nasional	Lulus
		Junior Graphic Designer (JGD) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lulus
21	Mansyah	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
22	Marulitua	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PPK Tipe C	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Lulus

		Training Of Trainers (TOT) Dasar Manajemen Bencana Angkatan V Di Pusat Secara Online Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
		Training of Trainers (TOT) Penyusunan Rencana Kontingensi di Pusat Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
23	Michael Oktaviyanes	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Digital Public Relations	BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Lulus
		Bimtek Optimalisasi Pembinaan Pegawai melalui Coaching dan Mentoring	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		AHJ Coaching Forum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Penigkatan Kapasitas Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta Tema Penulisan Siaran Pers dan Penceritaan Data dalam Penanggulangan Bencana	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta	Lulus
24	Mohamad Yohan	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Kepemimpinan Administrator	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
25	Muhamad Thoufiq Hidayatuloh	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PPK Tipe C	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Capacity Building Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus

25	Muhammad Faris Azmi	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
26	Nanda Ramadhan Wibowo	Bimbingan Teknis Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB	Lulus
27	Okti Melyana	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
28	Raden Aju Eko Suprpti	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
29	Rangga Bima Setiawan	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Komunikasi Publik - Komunikasi Krisis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
30	Rian Sarsono	PPNS	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan After Action Review (AAR) Simulasi Penanggulangan Bencana Batch 2 Metode Daring Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
31	Riesmah Oktapriana	Bahasa Inggris Untuk Presentasi	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus

		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
32	Rizka Mahlia	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Stres	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
33	Rosalin Simanjuntak	Diklat Manajemen Stres	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
34	Sa'diyah	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Training of Trainers (ToT) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Angkatan II di Pusat Tahun Anggaran 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
		diklat jitupasna tingkat analis	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
35	Salman Ansori	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
36	Suharto Joyo Mangunkusumo	Diklat Komputer (Microsoft Office)	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
37	Sukrul Ma'mun	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Lulus

		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
		Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Naskah Akademik	Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Lulus
38	Tintin Rustini	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
39	Veranisa Tya Cahyani	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
40	Vitus Dwi Indarto	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lulus
41	Wardaya	Capacity Building Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
42	Win Endrias	Pelatihan Pencapaian Indeks BerAKHLAK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PPK Tipe C	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
43	Yulia Indah Sulistyorini	Diklat Manajemen Resiko Tahun 2024	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Lulus
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional	Lulus

			Penanggulangan Bencana	
45	Zaini Miftah	Capacity Building Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Lulus

Tabel 3.6 Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan Pelatihan 2024

Selain itu, BPBD memberikan Bimbingan Teknis kepada Petugas Penanganan Bencana berupa :

- a. Peningkatan Kapasitas Pertolongan di Permukaan Air Bagi Petugas Penanganan Bencana
 - b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Personil Dalam Penanganan Korban dan Pengungsi Akibat Bencana
3. Rotasi dan promosi pegawai untuk menjaga motivasi dan kinerja

h. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dengan andalannya Layanan Jakarta Siaga 112/ Call Center 112 dan command Center. Beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan teknologi dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas utama BPBD. Teknologi yang digunakan meliputi:

1. Sistem peringatan dini berbasis IoT (Internet of Things) untuk memantau potensi bencana.
2. Penggunaan drone untuk survei dan pemetaan area terdampak.
3. Integrasi data berbasis GIS untuk perencanaan dan analisis risiko bencana.
4. Aplikasi Siaga 112 dan Layanan Omnichannel Jakarta Siaga 112 merupakan inovasi layanan digital dari Jakarta Siaga 112 yang dapat diakses secara gratis melalui semua operator telepon, baik telepon seluler (dengan atau tanpa simcard), telepon rumah dan melalui Whatsapp di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Aplikasi Simba merupakan aplikasi utama yang digunakan di BPBD

merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh petugas yang bersumber dari informasi SKPD terkait, laporan masyarakat, lurah dan lain-lain serta dari pemantauan petugas piket di lapangan.

Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Ruang Literasi Kebencanaan yang menggunakan teknologi simulasi gambaran kejadian bencana (VR).

i. Perbandingan Capaian Dengan Nasional Terkait IKU Utama (IKD)

Secara Nasional, BPBD Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Indeks Risiko Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Hazard (Bahaya)} \times \text{Vulnerability (Kerentanan)}}{\text{Capacity (Kapasitas)}}$$

(IRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah berdasarkan analisis terhadap bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Di Indonesia, IRB dihitung menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melalui Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012. Nilai IRB berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar tingkat risiko bencana di wilayah tersebut.

Komponen utama IRB meliputi:

1. Bahaya (Hazard): Potensi terjadinya suatu bencana, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, dan lain-lain.
2. Kerentanan (Vulnerability): Tingkat kerentanan suatu wilayah yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur.
3. Kapasitas (Capacity): Kemampuan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana.

BPBD DKI Jakarta menggunakan IRB sebagai dasar untuk menyusun kebijakan mitigasi dan alokasi sumber daya guna memprioritaskan wilayah-wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi. Integrasi IRB dalam perencanaan strategis membantu meningkatkan ketangguhan Jakarta terhadap berbagai ancaman bencana.

Beberapa rencana aksi untuk mencapai peningkatan nilai IKD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023 – 2027;
2. Penyusunan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana);
3. Pembentukan Peta Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD 2022;
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis JITUPASNA untuk Aparatur;
5. Penyusunan Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Peningkatan kapasitas petugas yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang datang ke Ruang Literasi Kebencanaan;
7. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Pertolongan di Permukaan Air Bagi Petugas Penanganan Bencana, Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung, Pembinaan dan pendampingan serta simulasi sekolah/madrasah aman bencana serta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Personil Dalam Penanganan Korban dan Pengungsi Akibat Bencana;
8. Memberikan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

Sehingga diperoleh nilai IKD tahun 2024 sebesar 0,61 dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	IKD 2024
Kepulauan Seribu	0,61
Jakarta Selatan	0,61
Jakarta Timur	0,61
Jakarta Pusat	0,61
Jakarta Barat	0,61
Jakarta Utara	0,61

Tabel 3.7 Nilai IKD 2024

j. Penghargaan Dalam Pencapaian IKU

BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik yang terus berkembang dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang modern, mengantisipasi perkembangan tersebut sebagai bagian dari rencana pengembangan jangka panjang. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi publik secara baik dan efisien yang dapat diakses dengan mudah.

Pada tahun 2024, BPBD DKI Jakarta memperoleh penghargaan sebagai "Instansi Terbaik dalam Penanggulangan Bencana" tingkat nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penghargaan ini diberikan atas:

1. Inovasi dalam teknologi peringatan dini.
2. Pelaksanaan simulasi kebencanaan berskala besar.
3. Kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan mitra internasional.

k. Rencana Aksi di Tahun Yang Akan Datang

Secara umum Rencana aksi BPBD DKI Jakarta untuk tahun 2025 mencakup:

1. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan pusat komando bencana yang lebih modern.
2. Pengembangan SDM: Pelatihan intensif bagi personel dengan fokus pada teknologi kebencanaan.
3. Kolaborasi Internasional: Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya.
4. Inovasi Teknologi: Pengembangan aplikasi berbasis AI untuk prediksi bencana yang lebih akurat.
5. Kampanye Kesadaran Publik: Menggalakkan program edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal.

Sedangkan khusus untuk Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD terkait IKU adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Penyusunan draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontijensi Bencana Gempa Bumi
3. Revisi Peraturan Gubernur tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana
4. Pembentukan Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) melalui Keputusan Gubernur
5. Penyusunan Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Menyusun strategi untuk peningkatan pemahaman masyarakat terkait informasi Rawan Bencana
7. Menyusun strategi untuk peningkatan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
8. Menyusun strategi dan kebijakan dalam peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dengan langkah-langkah strategis ini, BPBD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik dalam penanggulangan bencana.

3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja program. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2024, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional.

**REALISASI KINERJA BPBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja
BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TEPAT WAKTU	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK			INDEKS KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	57,75	99,57%	Sangat tinggi
PDIK	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	100,00%	Mencapai Target

PDIK	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	2	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK			INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00%	Mencapai Target

BPBD	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK			INDEKS KEPUASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16	100,00%	Mencapai Target
BPBD		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00%	Mencapai Target
PDIK	1.05.01.1.07.0011		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	7	100,00%	Mencapai Target

BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN TERHADAP KINERJA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK			INDEKS KEPUASAN TERHADAP KINERJA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	4	4	100,00%	Mencapai Target
PDIK			INDEKS KEPUASAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	64	100,00%	Mencapai Target

PDIK		Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	19	100,00%	Mencapai Target
PDIK			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68	108	158,82%	Mencapai Target
BPBD			PERSENTASE MASYARAKAT DAN APARATUR YANG DILATIH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,92	0,997	108,37%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGUNGI TERLAYANI KEBUTUHAN DASARNYA DALAM WAKTU 1 KALI 24 JAM	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD			PERSENTASE PENDAMPINGAN YANG DILAKSANAKAN PADA PASCA BENCANA	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD			PERSENTASE KELURAHAN YANG DIBERIKAN INFORMASI RAWAN BENCANA.	100	100	100,00%	Mencapai Target
PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PERSENTASE KELURAHAN YANG DIBERIKAN INFORMASI RAWAN BENCANA.	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	329	336	102,13%	Mencapai Target

PDIK			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20	20	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	JUMLAH APARATUR, RELAWAN SERTA POTENSI MASYARAKAT LAINNYA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	6787	9099	134,07%	Mencapai Target
PDIK			JUMLAH APARATUR, RELAWAN SERTA POTENSI MASYARAKAT LAINNYA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	35	35	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	5	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1	1	100,00%	Mencapai Target

BPBD	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	267	267	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	4520	4520	100,00%	Mencapai Target
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	35	35	100,00%	Mencapai Target
PDIK							
BPBD	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	2000	2000	100,00%	Mencapai Target

BPBD	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1000	1267	126,70%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	12	12	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1	1	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29884	29884	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100	100	100,00%	Mencapai Target
			PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100	100	100,00%	Mencapai Target

BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100	100	100,00%	Mencapai Target
PDIK			PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100	100	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1	1	100,00%	Mencapai Target
PDIK	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12	12	100,00%	Mencapai Target
BPBD	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1	1	100,00%	Mencapai Target

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja BPBD 2024

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa hambatan/kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Perlunya penyempurnaan dalam sistem perencanaan program dan kegiatan;
2. Terbatasnya SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Belum terpenuhinya standaritas dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini, SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dinilai berdasarkan hasil penilaian kompetensi;
4. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan karena masalah belum adanya pedoman dari Pemerintah Pusat, keterbatasan waktu, serta permasalahan teknis lainnya.

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1. Dalam proses perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Renstra;
2. Penyusunan standar-standar kinerja maupun proses dari setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi target *output* dan *outcome*-nya, sehingga mudah untuk mengukur keberhasilannya;
3. Pengembangan serta peningkatan prasarana dan sarana, sehingga dapat mendukung kegiatan penanggulangan bencana secara optimal;
4. Proses pemberdayaan SDM diarahkan pula kepada peningkatan kemampuan

dan keterampilan dalam bentuk pelatihan penanggulangan bencana baik pada tahap pra, tanggap darurat maupun pasca bencana serta pelatihan kompetensi lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

5. Penetapan standar operasional prosedur dan Bahan Kebijakan Lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti Standar Operasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan Bantuan Dana, Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana di dalam dan di luar Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Standarisasi Sumber Daya Manusia dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

3.5 Realisasi Anggaran

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, akan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja program.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2024, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun berikutnya.

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional.

Upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan melalui penetapan dan

pelaksanaan program dan rincian kegiatan dilakukan oleh seluruh lini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Rekapitulasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL			
- Barang Jasa	52.913.840.642	48.441.652.765	91,55%
- Modal	46.543.784.974	45.063.800.900	96,82%
BTL			
- Pegawai	28.360.989.199	26.040.939.199	91,82%
Total BL dan BTL	127.818.614.815	119.546.392.864	93,53%

Tabel 3.9 Rekapitulasi Anggaran BPBD 2024

Tabel 3.3 Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Berikut ini merupakan rincian dari realisasi anggaran :

BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.916.034.154,00	32.290.123.571,00	92,48%
BPBD	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TEPAT WAKTU	8.850.000,00	0,00	0,00%
BPBD	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.850.000,00	0,00	0,00%
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	28.362.074.099,00	26.041.932.099,00	91,82%
PDIK			INDEKS KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN			
BPBD	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28.360.989.199,00	26.040.939.199,00	91,82%
PDIK	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.084.900,00	992.900,00	91,52%

PDIK	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	124.347.087,00	124.268.300,00	99,94%
PDIK	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	124.347.087,00	124.268.300,00	99,94%
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	2.978.609.191,00	2.792.120.025,00	93,74%
PDIK			INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM			
BPBD	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.386.260,00	99.654.856,00	99,27%
PDIK			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39.010.274,00	38.861.500,00	99,62%
PDIK			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	183.141.042,00	153.234.344,00	83,67%
PDIK			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	877.347.868,00	858.207.868,00	97,82%

PDIK			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.900.000,00	70.725.000,00	68,73%
PDIK			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
BPBD	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.069.801,00	111.153.000,00	93,35%
PDIK			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
BPBD	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.556.753.946,00	1.460.283.457,00	93,80%
PDIK			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	371.907.720,00	355.999.500,00	95,72%

PDIK			INDEKS KEPUASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
BPBD	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	170.132.826,00	156.474.000,00	91,97%
BPBD	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	201.774.894,00	199.525.500,00	98,89%
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
PDIK			INDEKS KEPUASAN TERHADAP KINERJA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.			
BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN TERHADAP KINERJA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	817.486.728,00	800.766.313,00	97,95%
PDIK						
PDIK	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	661.456.248,00	644.946.313,00	97,50%

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	156.030.480,00	155.820.000,00	99,87%
PDIK			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
BPBD	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	INDEKS KEPUASAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.			
			INDEKS KEPUASAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.	2.252.759.329,00	2.175.037.334,00	96,55%
PDIK						
BPBD	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.052.641.207,00	1.004.594.139,00	95,44%

PDIK		Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
BPBD	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.200.118.122,00	1.170.443.195,00	97,53%
PDIK			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran BPBD 2024

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk laporan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

LKIP ini disusun sebagai salah satu media akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja tersebut bukan hanya diukur semata - mata dari pencapaian indikator kinerja yang secara normatif ditunjukkan dalam angka - angka / nilai kuantitatif akan tetapi yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dari aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengupayakan penyempurnaan diberbagai sisi, seperti pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala oleh para Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), penyelarasan program dan IKU yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan ke depan antara lain:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data

Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan analisis data dalam perencanaan dan

evaluasi program penanggulangan bencana guna memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Antar Lembaga

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan terkait mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana. Memperkuat sinergi dengan instansi terkait, seperti BMKG, BNPB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

3. Optimalisasi Anggaran dan Efisiensi Program

Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan setiap program memiliki output dan outcome yang jelas serta terukur. Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan serta kondisi kebencanaan yang berkembang.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program kesiapsiagaan dan edukasi kebencanaan guna membangun budaya sadar bencana. Mengembangkan sistem pelaporan masyarakat berbasis digital untuk mempercepat respons dan penanganan bencana.

5. Penyempurnaan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Memperkuat sistem pelaporan kinerja agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis hasil. Mengembangkan indikator kinerja yang lebih komprehensif untuk mengukur keberhasilan program secara lebih objektif.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja BPBD DKI Jakarta semakin meningkat dalam menghadapi tantangan kebencanaan, serta dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.